

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hak terhadap informasi merupakan elemen yang sangat penting dalam menciptakan demokrasi, pemerintah dituntut untuk lebih transparan dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Sistem desentralisasi pada tahun 2004 mendorong pemerintah daerah untuk berperan lebih aktif bagi pembangunan daerahnya.

Pemerintahan yang demokratis harus diwujudkan dengan adanya transparansi (keterbukaan). Pendapat tersebut senada dengan Purwanto B.T, Sunardi (2010) menyatakan pemerintahan yang demokratis harus mengutamakan keterbukaan dalam menyelenggarakan pemerintahan sehingga rakyat dapat mengerti dan mengetahui semua kebijakan yang diperuntukkan baginya.

Transparansi direalisasikan dengan adanya informasi kepada publik dari berbagai aspek yang memuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemerintahan. Dengan disahkannya UU KIP nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan semakin banyaknya penggunaan internet mendorong pemerintah daerah untuk lebih terbuka lagi. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak membuka data pemerintahan kepada publik, bahkan hak masyarakat untuk mengakses informasi di Indonesia juga sudah dijamin pada Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28 F

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*

Artinya masyarakat berhak untuk memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan internet, media cetak maupun informasi secara langsung. Pemerintah Indonesia melalui persiden RI mengungkapkan bahwa publik berhak mengetahui informasi pemerintahan agar terciptanya open government. Dalam sidang paripurna tanggal 7 Juli 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan

*“Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik meniscayakan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, publik memiliki hak untuk mengetahuinya. Inilah ciri-ciri dari opengovernment yang menjadi salah satu nilai dalam negara demokrasi.”*

Open Government merupakan bagian dari pemerintah yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis harus menjamin keadilan di segala bidang sehingga rakyat merasa mendapat perlindungan dan pengayoman. Open government menuntut komitmen masyarakat dan mental aparatur pemerintah dalam melaksanakan sistem pemerintahan yang demokratis. Open government akan menjaga akuntabilitas

pemerintah daerah karena dengan keterbukaan tersebut masyarakat dapat dengan mudah mengakses data pemerintahan, sehingga dalam menggunakan anggaran pemerintahan diawasi oleh masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan pemerintahan, memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hukum mereka terjamin.

Jaminan keadilan bagi masyarakat dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan hukum merupakan salah satu indikator keberhasilan Open Government. Pemerintahan yang terbuka Open Government menjadikan pemerintah yang cerdas dalam menyelesaikan masalah dan melayani masyarakat. Perlu adanya kerjasama dalam pembangunan ekonomi agar open government dapat berjalan dengan baik.

Pada pasal 20 ayat 2 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa badan publik wajib mengumumkan informasi dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam PERKI tersebut dengan jelas menyatakan bahwa situs web merupakan media layanan informasi data yang wajib dimiliki oleh badan publik. Situs web merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan open government data, agar masyarakat

dengan mudah dapat mengakses data pemerintahan serta ikut berpartisipasi dalam pengembangannya (Bara Ubaldi, 2012:4).

Pengembangan internet adalah sebagai kanal setiap situs untuk saling bertukar data yang penting. Melalui situs web data publik dapat diakses dengan cepat, tepat, dan tepat oleh masyarakat. Untuk dapat menjalankan pelayanan tersebut setiap badan publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di daerahnya masing-masing. PPID adalah Pejabat yang bertanggung-jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Belum semua pemerintah daerah bisa menerapkan open data berbasis elektronik dan membentuk PPID, tetapi pemerintah daerah harus bisa menyesuaikan dengan kemajuan zaman agar tidak tertinggal dengan daerah lain.

Setiap daerah harus memiliki visi dan misi yang jelas mengenai open government agar memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Selain media online pemerintah juga seharusnya menerapkan open government menggunakan media lain. Masyarakat yang tidak dapat menggunakan media elektronik dapat memperoleh data melalui papan pengumuman atau secara langsung. Perlu waktu yang cukup lama untuk mengatakan bahwa open government data di daerah berhasil. Sumber daya, sarana dan prasarana, dan kepemimpinan juga menjadi faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan open government data.

Dengan keberhasilan open government data, pengembangan open government akan menjadi program lanjutan dari pemerintah.

Dalam kaneva internasional, Indonesia mendapatkan peringkat 52 dari 77 negara yang menerapkan open government data. Bahkan Indonesia bergabung dalam 8 negara pendiri open government partnership (OGP), Namun demikian Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain.

Di balik capaian itu, masih terdapat tantangan open government yaitu kesiapan badan publik dalam melaksanakan open government data pemerintah daerah. Permasalahan yang dihadapi sangat luas, dari permasalahan visi politisi yang kurang jelas sampai sumber dana dari sektor swasta yang sulit untuk didapatkan.

Data Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2011, Jawa Tengah merupakan urutan ke tiga dalam penerapan regulasi dalam keterbukaan informasi data melalui situs web. Pemerintah daerah Jawa Tengah menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan mandat untuk open data kepada publik. Sebagian besar Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah mulai membentuk PPID untuk mengembangkan open government data melalui media online.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan merupakan wilayah Jawa Tengah yang menerapkan open government data melalui media online. Melalui situs web **[www.pekalongankab.go.id](http://www.pekalongankab.go.id)** masyarakat bebas mengakses informasi dan data seputar Kabupaten Pekalongan. Web

tersebut merupakan salah satu web resmi pemerintah daerah yang masih aktif. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga berupaya mengembangkan open government data kepada publik melalui Portal Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dapat diakses melalui [www.ppidgekalongankab.go.id](http://www.ppidgekalongankab.go.id).

Menurut data dari kementerian komunikasi dan informatika tahun 2014, kabupaten pekalongan menempati urutan ke 18 dari 27 kabupaten/kota dalam penerapan open government di Jawa Tengah, dengan kategori kurang. Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**

**Peringkat e Government Indonesia wilayah Jawa Tengah**

NO	KABUPATEN/KOTA	DIMENSI				NILAI RADR-RADR	KATEGORI	
		KEBIJAKAN	KELEMBAGAAN	INFRA STRUKTUR	APLIKA SI			PERENCANAAN
1	Kota Pekalongan	3.50	3.47	3.14	3.53	3.60	3.45	Baik
2	Kabupaten Sragen	3.29	3.07	3.14	3.17	3.33	3.20	Baik
3	Kabupaten Sukoharjo	2.71	2.80	2.67	2.70	2.67	2.71	Baik
4	Kabupaten Batang	2.50	2.53	2.38	2.57	2.53	2.50	Baik
5	Kabupaten Kebumen	2.17	2.53	2.19	2.40	2.20	2.30	Kurang
6	Kabupaten Banyumas	2.54	2.33	2.05	2.23	2.27	2.28	Kurang
7	Kabupaten Kendal	1.92	2.93	2.05	2.17	2.27	2.27	Kurang
8	Kabupaten Kudus	2.04	2.33	2.62	2.27	2.00	2.25	Kurang
9	Kota Surakarta	1.67	1.93	2.57	2.70	2.27	2.23	Kurang
10	Kabupaten Rembang	2.13	2.13	1.95	2.30	2.47	2.20	Kurang
11	Kabupaten Demak	2.21	2.47	2.10	2.20	2.00	2.19	Kurang
12	Kabupaten Banjarnegara	2.08	2.13	2.38	2.07	2.00	2.13	Kurang
13	Kota Semarang	2.21	2.27	1.67	2.33	2.13	2.12	Kurang
14	Kota Magelang	1.79	2.13	2.00	2.27	2.33	2.11	Kurang
15	Kabupaten Wonogiri	1.92	2.33	1.95	2.23	2.07	2.10	Kurang
16	Kabupaten Purworejo	1.96	1.73	2.24	2.13	2.40	2.09	Kurang
17	Kabupaten Karanganyar	1.88	2.20	2.33	2.23	1.67	2.06	Kurang
18	Kabupaten Pekalongan	1.50	2.53	2.10	2.27	1.87	2.05	Kurang
19	Kota Salatiga	1.71	2.00	2.14	2.40	1.93	2.04	Kurang
20	Kabupaten Purballingga	1.83	2.07	2.00	2.27	1.27	1.89	Kurang
21	Kabupaten Temanggung	1.58	1.80	2.19	2.23	1.60	1.88	Kurang
22	Kabupaten Semarang	1.54	1.80	1.90	1.87	1.33	1.69	Kurang
23	Kabupaten Jepara	1.46	1.67	1.86	1.83	1.60	1.68	Kurang
24	Kabupaten Boyolali	1.42	2.00	1.43	1.97	1.27	1.62	Kurang
25	Kabupaten Grobogan	1.21	1.93	1.67	1.83	1.33	1.59	Kurang
26	Kabupaten Blora	1.29	1.67	1.43	1.77	1.33	1.50	Kurang
27	Kabupaten Klaten	1.29	1.67	1.33	1.53	1.53	1.47	Sangat Kurang
RADR-RADR		1.98	2.24	2.13	2.28	2.05	2.13	Kurang

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika “PeGi Jawa Tengah tahun 2014”

Berdasarkan penjelasan diatas serta pentingnya open government data untuk masyarakat, peneliti sangat tertarik untuk meneliti open government data di Kabupaten Pekalongan untuk mengetahui bagaimana kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan dalam pengembangan open government data secara cepat, mudah, dan sederhana. Oleh karena itu sangat diperlukan pengamatan dan pengkajian yang lebih lanjut.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas maka yang menjadi masalah adalah :

1. Bagaimana Kesiapan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Open Government Data?

## **C. Tujuan**

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana kesiapan organisasi pemerintah daerah dalam pengembangan open government data
2. Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan organisasi pemerintah daerah dalam pengembangan open government data

## **D. Manfaat**

### **1. Manfaat Teoritis**

- 1.1 Sebagai sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu tentang Open Government Data
- 1.2 Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya dalam topik yang relevan.

## **2. Manfaat Praktis**

2.1 Manfaat untuk pembaca adalah untuk menambah pengetahuan dan informasi mengenai kesiapan organisasi pemerintah daerah dalam mengembangkan open government data.

2.2 Dapat memberikan masukan tentang kesiapan dalam mengembangkan open government data di pemerintah daerah

## **E. Kerangka Teori**

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi, dan proposisi yang saling berkaitan guna memberi gambaran yang sistematis. Adapun teori yang penulis gunakan yaitu :

### **1. Demokrasi**

Joseph A. Schmeter mengungkapkan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sedangkan Sidnet Hook berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Demokrasi menurut Abraham Licoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada

di tangan rakyat. Dalam pemerintahan yang demokratis rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan pemerintah memiliki kekuasaan menjadi perwakilan dari rakyat. Sebuah negara dengan sistem demokrasi memiliki undang-undang untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang.

Dikutip dari Inu Kencana Syafii (2005:136) secara umum prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut :

- a. Adanya pembagian kekuasaan;
- b. Adanya pemilihan umum yang bebas;
- c. Adanya manajemen yang terbuka;
- d. Adanya kebebasan individu;
- e. Adanya peradilan yang bebas;
- f. Adanya pengakuan hak minoritas;
- g. Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum;
- h. Adanya pers yang bebas
- i. Adanya beberapa partai politik;
- j. Adanya musyawarah
- k. Adanya persetujuan parlemen;
- l. Adanya pemerintahan yang konstitusional;
- m. Adanya ketentuan tentang pendemokrasian;
- n. Adanya pengawasan terhadap administrasi publik;
- o. Adanya perlindungan hak asasi;
- p. Adanya pemerintahan yang bersih;

- q. Adanya persaingan keahlian;
- r. Adanya mekanisme politik;
- s. Adanya kebijaksanaan negara;
- t. Adanya pemerintahan yang mengutamakan tanggung jawab.

## 2. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Sedangkan menurut pamudji ( 1985:15 ) dikutip dari Khairul Abdullah pemerintah daerah adalah daerah otonom yang diselenggarakan secara bersama sama oleh seorang kepala daerah sekaligus merupakan sebagai kepala otonom.

Berdasarkan definisi diatas pemerintah daerah adalah daerah otonom yang berwenang untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Dalam melaksanakan pemerintahannya, pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah (gubernur, bupati atau walikota) yang dibantu jajarannya.

Sebagaimana dipahami secara umum bahwa keberadaan pemerintah daerah merupakan implikasi dari penerapan prinsip desentralisasi yang digunakan. Pada dasarnya pemerintahan dibagi menjadi dua jenis, yaitu : *local state government* dan *local autonomous government*. (Khairul Abdullah, 2012: 10)

*Local state government* (pemerintah daerah administratif) merupakan cabang tingkat pemerintah pusat. Pemerintah administratif

merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mengurus urusan pemerintahan pusat di daerah.

*Local autonomous government* (pemerintah daerah otonom) pemerintah daerah yang berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah otonom ini bukan merupakan bagian dari pemerintah pusat (Joeniarto,1992:13 dalam Khairul Abdillah, 2012:10).

Pemerintah daerah merupakan pemerintah yang mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat, meskipun pemerintah pusat mengutus pemerintah administratif ke daerah tetapi pemerintah administratif bukan merupakan bagian dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah memerlukan keterbukaan untuk menjaga akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan keterbukaan, siapapun dapat dengan mudah mengakses informasi dan mengawasi pemerintah tentang bagaimana anggaran pemerintah daerah dipergunakan. Di Inggris masyarakat dengan bebas dapat mengakses data institusi pemerintahan melalui situs website. Menurut Sue Bateman (pejabat kantor kabinet inggris), mengungkapkan "*Jika sistem pemerintahan sudah terbuka seperti ini, semua pejabat harus berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu karena publik dapat memonitor mereka*". Pendapat tersebut senada dengan literatur Marijn jassen et all, bahwa sebagian besar responden mengungkapkan data yang terbuka dapat memperkuat akuntabilitas, membangun

kepercayaan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat. *The key idea is that under the right circumstances, groups can generate better alternatives and make better decisions than even the smartest people can do on their own* (Surowiecki, 2004 dalam Marijn et. all, 2012 ).

Keterbukaan informasi juga dapat memberikan keuntungan lain kepada pemerintah daerah, yaitu untuk mencegah terjadinya korupsi karena semua transaksi pembelanjaan dan pemasukan terbuka untuk publik seperti yang diungkapkan oleh Stewart "Dengan adanya penerapan sistem keterbukaan data di setiap sektor, pemerintah dapat dengan mudah mengakses institusi swasta seperti rumah sakit, dan menilai kinerja mereka, bahkan bisa menutup rumah sakit yang memiliki kinerja tidak baik"

### **3. Open Government Data**

Open government menurut OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) as "*the transparency of government actions, the accessibility of government services and information, and the responsiveness of government to new ideas, demands and needs.*"

Data adalah aliran fakta mentah yang menunjukkan peristiwa yang terjadi dalam organisasi dalam lingkungan fisik dan ditata dalam suatu bentuk yang bisa di pahami dan digunakan. Secara konseptual, data adalah deskripsi tentang benda, aktivitas dan transaksi yang tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai.

Menurut Barbara Ubaldi (2013: 6) open government data mulai ramai sejak tahun 2008 di Amerika Serikat. Menurutnya, Open government data terdiri dari dua unsur utama yaitu : *Government data dan open data. The two main elements of Open Government Data are normally defined as follows:*

1. *Government data: is any data and information produced or commissioned by public bodies.*
2. *Open data: are data that can be freely used, re-used and distributed by anyone, only subject to (at the most) the requirement that users attribute the data and that they make their work available to be shared as well.*

Data pemerintah dianggap terbuka untuk publik jika sesuai dengan prinsip-prinsip di bawah ini:

1. *Complete* : Data tidak tunduk pada hak cipta, paten, merek dagang atau perdagangan peraturan rahasia. Privasi wajar, pembatasan keamanan dan hak istimewa mungkin diperbolehkan.
2. *Primary* : Data dikumpulkan sebagai pada sumbernya, dengan tingkat kemungkinan tertinggi granularity, tidak dimodifikasi terlebih dahulu.
3. *Timely* : Data disediakan secepat yang diperlukan untuk melestarikan nilai data.

4. *Accessible* : Data tersedia untuk jangkauan terluas
5. *Machine Processable*: Data yang disediakan cukup terstruktur untuk memungkinkan dapat digunakan kembali oleh penggunanya.
6. *Non-discriminatory* : Data yang tersedia untuk siapa saja, tanpa terkecuali.
7. *Non-proprietary* : Data tersedia dalam format dimana tidak ada entitas memiliki kontrol eksklusif.
8. *License-Free* : Data tidak tunduk pada hak cipta, paten, merek dagang atau perdagangan peraturan rahasia. Privasi wajar, pembatasan keamanan dan hak istimewa mungkin diperbolehkan.

Berdasarkan definisi diatas open government data adalah kebebasan masyarakat dalam menggunakan data yang dihasilkan oleh pemerintah secara cepat, terstruktur, dan jangkauan luas agar dapat dimanfaatkan kembali oleh penggunanya tanpa syarat.

#### **4. Open Government Data Readiness**

Survei pada tahun 2003 mengungkapkan bahwa 67 negara telah memakai *clearing house* di situs web, 13 negara sedang dalam proses dan 113 negara lainnya belum melakukan inisiatif untuk menggunakan *clearing house* untuk open government data.

PBB juga melakukan survei kesiapan e-government di 191 negara untuk melakukan latihan *e-readiness* dengan menilai website, infrastruktur telekomunikasi dan sumber daya manusia. Indeks dari *e-readiness* adalah bagaimana pemerintah dapat berpartisipasi secara

elektronik untuk menghubungkan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat seperti yang diungkapkan oleh (e Technology Grup, 2003 dalam Tatiana, 2005:2)

*“ An e-Readiness index could be defined as the degree to which a country is prepared to participate in the networked world. It demands the adoption of important applications of ICTs in offering interconnectedness between government, businesses and citizens. As an analogy, SDI readiness index could be defined as the degree to which a country is prepared to deliver its geographical information in a community (local, national, regional, or global). It demands a variety of geospatial services offered in the widest connectivity to satisfy government, business and citizen geoinformation needs”.*

Dari definisi diatas open government data readiness adalah kesiapan pemerintah untuk berpartisipasi dalam dunia elektronik untuk membuka data kepada publik agar dapat digunakan kembali oleh penggunanya.

Keberhasilan Open government data tidak lepas dari faktor yang menjadi tolak ukur kesiapan *open government data*, ditinjau dari beberapa studi sebelumnya (Giff & Coleman, 2002)(Kok & van Loenen, 2004)(Crompvoets et al, 2004)(UNDESA, 2003). Dikutip dari Tatiana, berikut faktor kesiapan dalam open government data:

1. *Organizational* : Politisi, Kepemimpinan kelembagaan, payung hukum

2. *Information* : Ketersediaan kartografi digital,  
Ketersediaan metadata
3. *Acces Network* : Konektivitas website, infrastruktur teknologi, ketersediaan perangkat lunak geospasial/in- house development
4. *People* : Tingkat pendidikan, budaya SDI, Kepemimpinan individu
5. *Financial Resource* : Sumber dana pemerintah, sumber swasta, inisiatif

Dari faktor open government data sebagai pecahan masalah multi kriteria, maka perlu adanya pemisahan faktor tersebut kedalam beberapa kriteria seperti tertera dalam tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Faktor untuk Mengukur Kesiapan Open Government Data**

Factor	Decision Criteria
Organizational (O)	Politician vision (Ov)
	Institutional Organizational (O) leadership (Ol)
	Umbrella legal agreement(s) (Oa)
Information/ Data availability (I)	Digital cartography availability (Ic)
	Metadata availability (Im)
People (P)	Human Capital (Pc)
	SDI culture-education (Ps)
	Individual leadership (Pl)
Acces Network (A)	Web connectivity (Aw)
	Telecommunication infrastructure (At)
	Geospatial software availability (As)/ own
	Development (Ad)/ open source (Ao)
Financial Resources (F)	Government central funding (Fg)
	Data Policy aimed to return on investment (Fr)
	Private sector activity (Fp)

*Sumber : Tatiana Dergado Fernandes,2012“Assesing an SDI Readiness Index”*

Dalam penelitian ini peneliti mengukur kesiapan organisasi pemerintah daerah dalam open government data. Pengukuran tersebut dilihat dari berbagai aspek, yaitu :

1. Aspek Organizational diukur dari :

a. Visi Politisi

Visi/ cita-cita politisi untuk membangun daerahnya.

b. Kepemimpinan institusi

Kemampuan pejabat daerah untuk mengajak orang lain mencapai tujuan organisasinya

c. Payung hukum

Landasan hukum yang mendasari pemerintah daerah dalam open government data

2. Aspek Information / Data Availability diukur dari :

a. Ketersediaan kartografi digital

Pemerintah daerah menyediakan kartografi secara elektronik/digital

b. Ketersediaan metada

Pemerintah daerah menyediakan metada

3. Aspek People diukur dari :

a. Sumber Daya Manusia

Seseorang yang bekerja dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi

b. Kebudayaan pendidikan Infrastruktur Data Spasial

Tingkat pendidikan seseorang untuk menginformasikan data spasial di lingkup pemerintah daerah

c. Kepemimpinan individu

Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi diri sendiri maupun orang lain untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Aspek Acces Network diukur dari :

a. Konektivitas Website

Kemudahan pengguna dalam menggunakan situs webyang disediakan oleh pemerintah daerah

b. Infrastruktur telekomunikasi

Infrastruktur dalam penyampaian informasi dari satu tempat ke tempat lainnya.

c. Perangkat lunak Geospasial/ pengembangan diri/ sumber terbuka

Ketersediaan software untuk mengukur data tentang lokasi geografis wilayah

5. Aspek Financial Resources diukur dari :

a. Sumber dana

Sumber dana yang digunakan dalam upaya pengembangan *open government data*.

b. Perencanaan/Kebijakan untuk investasi

Suatu aturan yang dimiliki oleh pemerintah guna menarik dana dari berbagai sektor.

c. Kegiatan sektor swasta

Aktivitas dari sektor swasta yang dapat memberikan kontribusi pemasukan bagi pemerintah daerah.

## **F. Definisi Konsepsional**

Definisi konsep merupakan usaha penulis untuk memberikan kejelasan batas antara pengertian konsep satu dengan konsep lainnya. Adapun definisi konsepsional yang digunakan adalah :

### **1. Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah adalah suatu daerah otonom yang berwenang untuk mengatur daerahnya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah di pimpin oleh seorang kepala daerah sesuai dengan tingkat daerahnya, yaitu : Gubernur, Bupati/ Walikota.

### **2. Open Government Data**

Open government data merupakan kebebasan masyarakat dalam mengakses, mengumpulkan dan menyimpan data untuk digunakan kembali oleh penggunanya. Open government data terdiri dari dua aspek, yaitu : open data dan government data.

### **3. Open Government Data Readiness**

Open Government Data Readiness adalah kesiapan suatu organisasi pemerintah untuk ikut berpartisipasi dalam menggunakan media elektronik untuk memberikan data kepada publik secara cepat, mudah, dan sederhana.

## **G. DEFINISI OPERASIONAL**

Definisi Operasioanal merupakan definisi dari konsep atau variable yang digunakan dalam penelitian yang merupakan simpulan deduktif penulis dari teori-teori yang digunakan dalam kerangka dasar teori. Untuk memperjelas arah penelitian maka penulis menyusun definisi operasional variable berdasarkan:

1. Operasional Variabel Organizational diukur dari :
  - a. Visi Politisi
  - b. Kepemimpinan institusi
  - c. Payung hukum
2. Operasional Variabel Information / Data Availability terdiri dari :
  - a. Ketersediaan kartografi digital
  - b. Ketersediaan metada
3. Operasional Variabel People terdiri dari :
  - a. Sumber Daya Manusia
  - b. Tingkat pendidikan Infrastruktur Data Spasial
  - c. Kepemimpinan individu
4. Operasional Variabel Acces Network terdiri dari :
  - a. Konektivitas Website
  - b. Infrastrukur telekomunikasi
  - c. Perangkat lunak Geospasial/ pengembangan diri/ sumber terbuka

5. Operasional Variabel Financial Resources terdiri dari :
  - a. Sumber dana
  - b. Kebijakan untuk investasi
  - c. Kegiatan sektor swasta.

## **H. Metode Penelitian**

Dalam sebuah penelitian metodologi sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian, agar dapat mempertanggung jawabkan secara ilmiah. Metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara yaitu dari kerja untuk memahami obyek-obyek yang menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan ( Winarno surachmad, 1990:53 dalam Yoga DF, 2015: 35). Pada penelitian ini peneliti menentukan terlebih dahulu jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, unit analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Hal tersebut dipergunakan untuk mempermudah dalam mencapai tujuan dari penelitian.

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Adapun penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara tepat dapat menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan suatu frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Dalam hal ini mungkin sudah ada hipotesa-hipotesa, atau mungkin belum,

tergantung dari sedikit banyaknya pengetahuan tentang masalah yang bersangkutan.

Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai gambaran dan melukiskan subyek atau obyek penelitian. (Moelong 2000:3). Penelitian deskriptif merupakan metode pemecahan masalah dengan menghasilkan data lapangan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka angka. Pada laporan penelitiannya, akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data yang diperoleh berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video-tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2000:6).

Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan secara sistematis fenomena atau gejala yang tidak dapat diukur dengan angka.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Sekretariat daerah Kabupaten Pekalongan serta satuan kerja terkait seperti Bidang Konunikasi dan Informasi di Kabupaten Pekalongan.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam data menurut klasifikasi berdasarkan jenis dan sumbernya, yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian. Data primer dalam penelitian

ini diperoleh dari wawancara langsung kepada informan, dalam hal ini yaitu:

- a. Kepala Dishubkominfo Kabupaten Pekalongan
- b. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dishubkominfo Kabupaten Pekalongan
- c. Staf Bidang Komunikasi dan Informatika Dishubkominfo Kabupaten Pekalongan
- d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan
- e. Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan
- f. Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan
- g. Masyarakat Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan variabel penelitian yang ada, maka pengambilan data primer penelitian ini menyangkut aspek-aspek sebagai berikut :

**Tabel 1.3**

**Data Primer Penelitian**

No.	Variabel	Indikator	Jenis Data	Sumber Data
1.	Organizational (Organisasi)	Visi Politisi (Bupati/Daera)	Data Primer	Bidang Kominfo Dinhubkominfo Kab. Pekalongan Masyarakat
		Kepemimpinan institusi	Data Primer	Bagian Organisasi dan Kepegawaian

				Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan
		Payung hukum	Data Primer	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan
2.	Information (Informasi)	Ketersediaan kartografi digital	Data Primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Kominfo Dinhubkominfo o Kab. Pekalongan</li> <li>• Bagian Humas Sekretariat Daerah</li> <li>• Masyarakat Kab. Pekalongan</li> </ul>
		Ketersediaan metadata	Data Primer	Bidang Kominfo Dishubkominfo Kab. Pekalongan
3.	People (Manusia)	Sumber Daya Manusia	Data Primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Kominfo Dishubkominfo</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>
		Budaya Pendidikan SDI	Data Primer	Bidang Kominfo Dishubkominfo Kabupaten Pekalongan
		Kepemimpinan Individu	Data Primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagian Organisasi dan kepegawaian</li> <li>• Bidang Kominfo</li> </ul>

				Dishubkominfo Kabupaten Pekalongan
4.	Acces Network/ Akses Jaringan	Konektivitas Website	Data Primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat Kabupaten Pekalongan</li> <li>• Bidang Kominfo Dishubkominfo Kab. Pekalongan</li> </ul>
		Infrastruktur telekomunikasi	Data Primer	Bidang Kominfo Dishubkominfo Kab. Pekalongan
		Ketersediaan perangkat lunak geospasial/ pengembangan diri/ sumber terbuka	Data Primer	Bidang Kominfo Dishubkominfo Kab. Pekalongan
5.	Financial Resources (Sumber Dana)	Dana Pemerintah Pusat	Data Primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>
		Kebijakan data untuk investasi	Data Primer	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan

		Kegiatan sektor swasta	Data Primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagian Humas Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>
--	--	------------------------	-------------	---

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bentuk dari data sekunder ini berupa catatan-catatan, jurnal, koran, dokumen, laporan, dan sumber lainnya. Data sekunder dibutuhkan untuk melengkapi dan menunjang data primer.

#### 4. Unit Analisa

Unit penelitian ialah unit yang akan diteliti atau dianalisis, jadi dalam penelitian ini yang menjadi unit analisa pada penelitian ini adalah :

- a. Website resmi Kabupaten Pekalongan dengan domain:  
**www.pekalongankab.go.id**
- b. Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan
- c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
- d. Masyarakat Kabupaten Pekalongan

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik lapangan dan teknik kepustakaan.

Dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan 4 teknik, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi dua orang, dengan satu orang yang ingin memperoleh informasi dan satu orang sebagai pemberi informasi (narasumber). (Mulyana, 2001 dalam Hikmawati, 2014:29).

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tak terstruktur atau wawancara mendalam yang dilakukan secara spontan dengan berpedoman pada *interview guidences* yang telah disusun sebelumnya.

Wawancara ini akan ditunjukkan kepada pihak – pihak yang berkompeten serta memiliki informasi tentang kesiapan pemerintah daerah dalam open government data di Kabupaten Pekalongan. Wawancara akan dilakukan kepada dua pihak yaitu dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan masyarakat.

Berikut adalah daftar narasumber yang akan dijadikan objek penelitian, yaitu:

**Tabel 1.4**

**Daftar Narasumber Penelitian**

<b>No.</b>	<b>Kelompok</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1.</b>	<b>PEMERINTAH</b>	
	a. Kepala Dishubkominfo Kabupaten Pekalongan	1
	b. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dishubkominfo Kabupaten Pekalongan	1
	c. Bidang Komunikasi dan Informatika Dishubkominfo Kabupaten Pekalongan	2
	d. Staf Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Bagian Hummas Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan	1
	e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan	1
	f. Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan	2
<b>2.</b>	<b>Non - PEMERINTAH( Masyarakat )</b>	
	a. Perwakilan Akademisi	1
	b. Perwakilan Karyawan Swasta	1
	c. Perwakilan Mahasiswa	1
	d. Perwakilan Militer	1
	e. Perwakilan Masyarakat Biasa	1
	<b>Total</b>	<b>15</b>

2. Kuesioner

Menurut Arikunto (2006:151 dalam Alfansyi Gayto Hakka 2015:47) kuesioner adalah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sekumpulan orang untuk

mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang kesiapan pemerintah kabupaten pekalongan dalam pengembangan open government data dari responden yang telah dipilih. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan kuesioner *Skala likert*, dimana semua pilihan jawaban berdasarkan skala yang telah ditentukan.

a. Populasi

Populasi atau universe ialah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. (Tukiran dan Sofian Effendi : 154).

Sedangkan menurut Margono populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian dalam suatu lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi Populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Jika satu manusia memberikan satu data, maka banyaknya populasi akan sama dengan banyaknya manusia (Margono, 2004:118 dalam Alfansiye Gayto, 2015:48).

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan populasi adalah keseluruhan dari unit analisa atau subyek penelitian. Dalam penelitian ini subyeknya adalah SKPD yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah, DPRD Kabupaten Pekalongan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Pekalongan. Kelompok Non SKPD yaitu perwakilan LSM, Media massa, dan masyarakat.

b. Sampel

“Responden yang lebih besar dari persyaratan minimal sebanyak 30 elemen responden, responden yang di maksud disini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dan masyarakat Kabupaten Pekalongan. Dimana semakin besar sampel akan memberikan hasil yang lebih akurat.”(J.Supranto, 1987:239).

Sampel adalah contoh atau sebagian dari populasi yg menjadi objek penelitian. Tujuan menentukan sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati populasi reduksi terhadap jumlah objek penelitian. Untuk mengemukakan dengan teapat sifat-sifat umum dari populasi dan untuk menarik generalisasi hasil penyidikan. (Mardalis :1999).

Berikut adalah daftar sampel yang akan dijadikan objek penelitian, yaitu:

**Tabel 1.5**  
**Daftar Sampel Berdasar Kelompok**

No.	Kelompok	Jumlah
1.	<b>PEMERINTAH</b>	
	a. Pegawai Dishubkominfo Kabupaten Pekalongan	15
	b. Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan	20
2.	<b>Non - PEMERINTAH (Masyarakat)</b>	
	a. Perwakilan LSM	
	- LKP Nuansa	2
	b. Perwakilan Pengusaha	
	- Aditya Batik	3
	c. Mahasiswa	10
	d. Guru	10
	e. Karyawan Swasta	10
	f. Perwakilan Masyarakat Biasa	10
<b>Total</b>		80

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan pendekatan non probabilitas dengan menggunakan *Purposive sampling*. *Purposive sampling* (sampel bertujuan) dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dapat berdasarkan pertimbangan (judgement) tertentu atau jatah (quota) (Jogiyanto, 2007).

Menurut Margono, dalam Alfansyie Gayto Hakka (2015:50), pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling*, didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang

mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel 80 orang yang terdiri dari Pemerintah Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 30 pegawai. Anggota DPRD sebanyak 5 anggota, sedangkan dari non SKPD sebanyak 45 sisanya yang mewakili dari LSM, Pelaku usaha, dan Masyarakat umum.

### 3. Observasi (Pengamatan Lapangan)

Teknik observasi adalah studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan (DR.Kartono kartini, 1996:157).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan observasi dilakukan untuk melihat fakta yang ada di lapangan dengan hasil wawancara dan kuesioner yang dilakukan. Observasi dilakukaan bersamaan ketika wawancara narasumber.

### 4. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan langkah yang ditempuh untuk mengumpulkan data-data melalui dokumen atau catatan yang tersedia di dalam suatu organisasi dengan materi yang diambil. Teknik ini digunakan dalam mendapatkan data-data dengan cara pengamatan dan melihat dari arsip, brosur, dokumentasi-

dokumentasi, gambaran-gambaran atau grafik dalam lokasi penelitian yang bersangkutan.

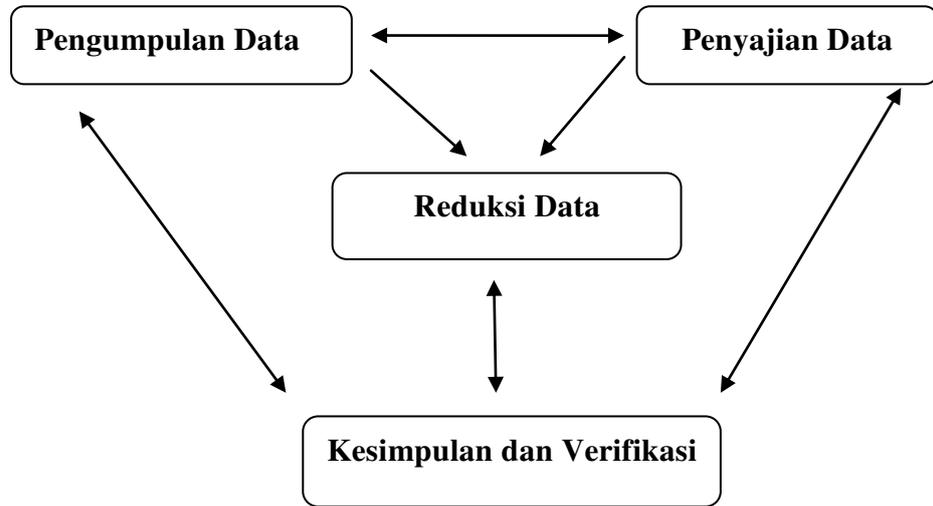
## **6. Teknik Analisa Data**

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif dengan bantuan data kuantitatif. Adapun penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bersifat menuturkan dan menafsirkan data yang ada dan menganalisa data yang diperoleh tetapi tidak sampai pada penalaran teori. Proses ini akan berjalan terus menerus selama penelitian berlangsung sebelum data benar benar terkumpul.

Menurut Bogdan dan Biklen (1992, dalam moeloeng, 2012:248) analisa kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi suatu yang dapat dikelola, mengintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dipelajari , dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian yang kaya data tidak akan berarti sama sekali jika data tersebut tidak dirangkai dalam struktur makna yang logis (Agus Salim, 2006: 20).

**Gambar 1.1**

**Komponen Analisa Data Model Interaktif**



*Sumber : Agus Salim, 2006 : 22 “ Teori dan Paradigma Penelitian Sosial”. Yogyakarta : Tiara Wacana*

**Proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :**

**1. Pengumpulan data**

Yaitu pencarian data penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.

**2. Reduksi data**

Setelah mendapatkan data-data maka data tersebut dibaca, dipelajari secara seksama sesuai dengan kebutuhan peneliti. Langkah selanjutnya adalah pemilihan, pengkategorian, penyederhanaan dan pemusatan data yang ada di lapangan relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti

(mereduksi data). Reduksi data dilakukan dengan membuat rangkuman dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga.

### 3. Penyajian data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dengan langkah memberikan skor untuk data kuesioner, data kuesioner digunakan untuk mengetahui kesiapan pemerintah daerah dalam open government data dengan menganalisis kuesioner. Sedangkan analisa secara kualitatif dengan mendeskripsikan jawaban responden yang telah diperoleh dan diuji menggunakan data kuantitatif yang kemudian disajikan dengan menggunakan tabel-tabel maupun narasi. Kemudian peneliti mulai menggambarkan fenomena atau keadaan dengan data yang telah direduksi dalam bentuk deskriptif naratif.

### 4. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah membuat kesimpulan dari hasil pemikiran dengan jalan melakukan perbandingan mengenai kenyataan di lapangan dengan teori berdasarkan data yang telah didapat (Nasution, 1992). Penarikan kesimpulan akan terus diverifikasi selama penelitian masih berlangsung sehingga data yang diperoleh valid.

## 7. Uji Keabsahan Data

Menurut Arikunto (1997), instrumen yang baik memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan reliabel. Pembuatan instrumen harus dilandasi dengan kajian pustaka, oleh karena itu kuesioner sebagai instrumen pengumpul data dalam penelitian ini perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Untuk kuesioner dapat diuji dengan 2 uji data bantuan sebagai berikut:

### a. Validitas

Uji validitas akan dilakukan dengan metode pearson atau metode *product moment* yaitu dengan mengkorelasikan skor butir kuesioner dengan skor total. Apabila nilai  $r_{hitung}$  lebih dari  $r_{tabel}$  maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid. Untuk butir yang tidak valid harus dibuang atau tidak dipakai sebagai instrument pertanyaan. Uji validitas ini menggunakan alat bantu SPSS 16.0 *for windows*. Adapun rumus yang digunakan adalah :

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$R_{xy}$  = Koefisien Korelasi

$X$  = Skor Item

$Y$  = Skor Total

$N$  = Banyaknya Subyek

b. Reliabilitas

Reliabilitas data dapat dilihat dari nilai output *composite reliability* atau *cronbach's alpha* dengan rumus:

$$r_{11} = \left[ \frac{k}{(k-1)} \right] \left[ 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan :

$R_{11}$  = Reliabilitas instrumen

$K$  = Banyaknya pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$  = Jumlah varians butir

$\sigma_t^2$  = Varians total

Setelah diperoleh nilai  $\alpha$ , selanjutnya membandingkan nilai tersebut dengan angka kritis reliabilitas lebih dari nilai kritis reliabilitas dapat ditentukan sebesar 0,60 (Imam Ghazali) sehingga dapat dikatakan *reliabel* jika nilai  $\alpha$  lebih besar dari angka kritis reliabilitas yaitu 0,60.

Sedangkan untuk menguji secara keseluruhan data diuji dengan teknik triangulasi.

c. Teknik Triangulasi

Teknik Triangulasi adalah teknik membandingkan data yang diperoleh antara satu sumber dengan sumber lainnya.

Dwidjowinoto dalam Kriyanto menerangkan bahwa Triangulasi terdiri dari beberapa macam, yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

2. Triangulasi Waktu

Mengecek data dengan mengadakan observasi tidak hanya satu kali, mengingat perilaku manusia yang dapat berubah setiap waktu.

3. Triangulasi Teori

Memanfaatkan dua teori atau lebih yang diadu. Untuk itu diperlukan rancangan riset, pengumpulan data, dan analisis data yang lengkap supaya hasilnya komperhensif.

4. Triangulasi periset

Menggunakan lebih dari satu periset untuk melakukan wawancara dan observasi.

5. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan yang sama.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menguji validitas data. Hal ini karena peneliti berusaha membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang sesuai dengan penelitian.

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton 1987: 331 dalam Velandani Prakoso, 2015: 56). Hal ini dapat ditempuh dengan jalan: (1) membandingkan data hasil wawancara dengan kuesioner, (2) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (3) membandingkan data hasil kuesioner dengan hasil pengamatan, (4) membandingkan apa yang dikatakan seseorang di depan umum dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (5) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (6) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, serta orang pemerintahan.